

Daftar Pustaka

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta : Pt. Rineka Cipta.
- Djalil, Rizal. (2014) *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya.

Jurnal :

- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473-485.
- Astuty, E., & Fanida, E. H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *E-Journal Unesa*, 1(2).
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*, 3(1), 119-130.
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 3(2).
- Taufik, T. (2013). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia, *Jurnal Ekonomi*, 17(01).

Skripsi :

- Andrian, Y. (2017). *Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015*.
- Apriliani, S. G. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*.
- Dewanti, E.D.W. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*.
- Haryati, S. (2015). *Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa (Studi Di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Huri, R. V. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013.
- Indah Mudarosatun, N. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo)(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Ismail, Akbar. (2017). Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 (Studi Kasus Desa Gufasa dan Desa Matui Kecamatan Jailolo).
- Karlinawati, N. (2017). Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banyusoco, Playen, Gunungkidul Tahun 2016
- Moedarlis, F. T. (2016). Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.
- Mubarak, Husni. (2017). Peran Kepemimpinan Lurah Tonggalan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Kelurahan Tonggalan.
- Romantis, P. A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014.
- Wardhani, S. K. (2018). Implementasi Alokasi Dana Desa Ta 2016 Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015.
- Wida, S. A. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Perundang-undangan :

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (belum ada)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 58 tahun 2005,tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, “anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Website :

<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2449/Petunjuk-Pengoperasian-Aplikasi-SisKeuDes.bpkp>. Diakses tgl 30 Maret 2018

<http://www.slemankab.go.id/10795/dana-desa-tahun-anggaran-2015-2016-2017.slm>. Diakses tgl 30 maret 2018